

ABSTRAK

USEP MURSID. NIM. E. 17 11 236. Pertanggungjawaban Penambangan Liar Emas Di Wilayah Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2022.

Eksploitasi sumber daya alam berupa logam emas di sekitar wilayah pertambangan pongkor kec Nanggung kab Bogor, sangat berkaitan pula dengan daya dukung wilayah tersebut. Hal ini disebabkan karena sumberdaya pada suatu daerah yang telah terganggu oleh aktivitas penambangan memiliki batas kemampuan untuk menghadapi perubahan, perubahan ini sangat berarti akan terjadinya penurunan dari berbagai fungsi lingkungan yang akan merubah mendukung sistem kehidupan, serta menyerap limbah yang ditimbulkan dengan adanya pertambangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban penambangan liar emas di Wilayah Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta mengetahui hambatan dan upaya dalam menertibkan penambangan liar di Wilayah Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian diketahui bahwa pertanggungjawaban penambangan liar emas di Wilayah Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterapkan sanksi terhadap penambang emas secara ilegal atau para gurandil dapat di pidana, selain merugikan negara para pelaku tersebut juga merugikan pihak pengelola tambang emas tersebut, juga para pelaku penambang emas tersebut tidak memenuhi standar keselamatan kerja yang ditetapkan oleh aturan yang ada sehingga dapat menyebabkan kecelakaan/kematian seperti yang tertuang pada Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata Kunci : Pertanggung jawaban, Penambangan Liar, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

USEP MURSID. NIM. E.1711236. Liability for Illegal Gold Mining in the District of Nanggung, Bogor Regency Based on Law Number 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management. Thesis, Law Study Program, Faculty of Law, Djuanda University, Bogor, 2022.

The exploitation of natural resources in the form of gold metal around the Pongkor mining area, Nanggung district, Bogor Regency, is also closely related to the carrying capacity of the area. This is because the resources in an area that has been disturbed by mining activities have a limited ability to deal with changes, this change means a decrease in various environmental functions that will change to support living systems, as well as absorb the waste generated by mining. The purpose of this study was to determine and analyze the liability of illegal gold mining in the District of Nanggung, Bogor Regency based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and to find out the obstacles and efforts to curb illegal mining in the District of Nanggung, Bogor Regency based on the Law. -Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The research method is needed to collect a number of materials used to answer the juridical analysis. Starting from the problem, the method used is an empirical research method, namely law as a symptom of society, as a social institution or patterned behavior. The results of the study revealed that the responsibility for illegal gold mining in the District of Nanggung, Bogor Regency based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, sanctions were applied to illegal gold miners or the gurandils could be punished, in addition to harming the state the perpetrators were also detrimental the management of the gold mine, as well as the perpetrators of the gold miners do not meet the work safety standards set by the existing rules so that it can cause accidents/deaths as stated in Article 98 paragraph (3) of Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management Environment.

Keywords: Liability, Illegal Mining, Protection and management of the environment.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Penambangan Liar Emas Di Wilayah Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”** dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. H. Martin Roestamy, S.H., M.H., selaku *Chancellor* Universitas Djuanda Bogor.
2. Ibu Dr. Hj. R. Siti Pupu Fauziah, M.Pd.I., selaku Direktur Eksekutif Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliah Indonesia.
3. Bapak Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc., selaku Ketua Umum Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliah Indonesia.
4. Bapak Prof Dr. Suhaidi, S.H., M.H., selaku Rektor dan selaku Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
5. Bapak Aal Lukmanul Hakim, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Djuanda Bogor.
6. Ibu Dr. Hj. Endeh Suhartini, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor II Bidang Kerjasama, PMB dan Pengembangan Usaha Universitas Djuanda Bogor.

7. Ibu Dr. Ir. Ristika Handarini, M.P., selaku Wakil Rektor III Bidang Pengabdian dan Hilirisasi Universitas Djuanda Bogor.
8. Bapak Dr. H. Achmad Jaka Santos Adiwijaya, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
9. Ibu Dr. Nurwati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
10. Ibu Dr. Ani Yumarni, S.HI., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Non Akademik Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor
11. Ibu R. Yuniar Anisa Ilyanawati, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
12. Ibu Siti Maryam, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
13. Bapak Dr. H. Achmad Jaka Santos Adiwijaya, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan masukan, saran, kritik, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
14. Bapak Mulyadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang telah mengarahkan dan membimbing penyusunan skripsi ini.
15. Para Bapak/Ibu Dosen Pengajar dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
16. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
17. Para penambang emas yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian di lingkungan kerjanya.

18. Kedua orang tua, istri, anak-anakku, dan keluarga besar penulis yang selalu memotivasi dan mendoakan agar penulis dapat mencapai cita-citanya.

19. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Djuanda.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Bogor, 24 Oktober 2022

Penulis

Usep Mursid
NIM. E. 17 11 236